

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN UMUM DI
KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2011-2013**

By:

Dwi Puspita Sari

E-Mail: dwipuspitasari500@yahoo.com

Supervisor: Dr. Hasanuddin, M.Si

Library of Riau University

Jurusan Ilmu pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study is intended to determine the role of the Government in implementing the policy, and to know the role of the Office of Library and Regional Archives in implementing the policy. This study focused on Libraries and Library and Archive Office of Karimun regency, whose scope lies in Karimun Riau Islands province, because given the most complex issues contained in the library. These problems include lack of public interest, infrastructure, and human resources. With the formulation of research problems that How public library policy development in Karimun and the factors that affect the implementation of the policy of public library development in Karimun. In the development of the library, the library has been no policy for the region applicable regulations especially those concerning libraries in Karimun, the study aims to identify and analyze policy public library development in Karimun. The research method is qualitative descriptive research data collection is done by observation, interviews and documentation.

From the results of research in the field indicates that the Office of Library and Regional Archives Karimun not have a policy of development of a library of standard, so that the public library is in Karimun still referring to existing policies at central and regional administration Riau, a policy that is in Karimun only Local Rules and Regulations in the form of Regents that a technical course. The factors that affect the implementation of the policy of development of public libraries in Karimun, through the theory of former Van Meter and Van Horn, namely: Target and policy standards, performance policies, resources, communication between implementing agencies, Characteristics implementing agencies, economic environment, social and politics and the attitude of the implementers. In this study, the authors conclude that the Local Government does not currently have a policy regarding the library so that local governments do not yet have its own guidelines in terms of policy particularly in view of the public library in Karimun. However, should the regional government should implement a specific policy of the library.

Keywords: Policy, Development, Public Library and Government Authority.

PENDAHULUAN

Saat ini perpustakaan di Indonesia masih belum bisa bersaing dengan perpustakaan negara berkembang lainnya. Pelayanan perpustakaan yang tidak maksimal, kurangnya program yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, serta fungsi perpustakaan yang belum maksimal menjadi beberapa faktor yang menyebabkan perpustakaan di Indonesia tertinggal jauh dengan negara berkembang lainnya. Selain kurangnya perhatian dari pemerintah, terdapat beberapa faktor lain di perpustakaan seperti faktor dana dan kurangnya tenaga ahli. Sementara itu ada anggapan bahwa rendahnya kebiasaan membaca merupakan beberapa contoh dari lambatnya perkembangan perpustakaan di Indonesia (**Fadillah Rahman, 2013:2**). Mengenai minat membaca masyarakat juga saat ini tergolong masih sangat rendah terbukti UNESCO pada tahun 2012 melaporkan bahwa indeks minat baca masyarakat baru mencapai angka 0,001 artinya dalam setiap 1.000 orang, hanya ada satu orang yang memiliki minat baca (**Sumber: Kompasiana.com, diakses: 04 oktober 2015**). Pemerintah dalam hal ini sebagai penentu kebijakan utama dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “*mencerdaskan kehidupan bangsa*” melalui peningkatan minat baca masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan pengembangan perpustakaan, diantaranya : Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang

Perpustakaan dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 2 tahun 2010 tentang Perpustakaan. Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang telah menetapkan dan menerapkan suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No. 7 tahun 2011 tentang pembentukan dan susunan organisasi lembaga teknis daerah Kabupaten Karimun, dimana Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun selaku lembaga teknis yang memiliki tugas untuk mengelola, membina, dan mengembangkan perpustakaan umum di Kabupaten Karimun.

Sebagaimana yang ditetapkan Peraturan Perundangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 02 Tahun 2010 Pasal 17 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan, yang berisikan :

1. Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan.
2. Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Pengembangan perpustakaan sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dilakukan

secara berkesinambungan. Untuk mengembangkan suatu perpustakaan umum di Kabupaten Karimun, maka Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun memiliki peran penting dalam menjalankan kebijakan yang sesuai

dengan Peraturan Daerah Kepulauan Riau No. 02 Tahun 2010. Sebagaimana arah kebijakan yang telah dibuat dalam pelaksanaannya, melalui Renstra KPAD Kabupaten Karimun, sebagai berikut:

1. Mengadakan sarana dan prasarana aparatur perpustakaan dan arsip.
2. Melakukan pembinaan pada tenaga perpustakaan dan tenaga arsip dengan mengikuti sertakan pada bagian diklat baik yang diselenggarakan tingkat daerah maupun ditingkat pusat.
3. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan supervisi pada perpustakaan.
4. Mengadakan dan melaksanakan sistem manajemen pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan arsip melalui aplikasi komputerisasi.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap perpustakaan.
6. Mengembangkan minat baca dan budaya baca kepada masyarakat di Kabupaten Karimun.
7. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.

Adapun mengenai salah satu aspek dari Pemerintah Daerah di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun yang harus diatur secara hati-hati adalah permasalahan dari pengembangan perpustakaan umum di Kabupaten Karimun, diantaranya :

1. Kurangnya minat membaca dari masyarakat dinilai sangat rendah untuk itu perlu digalakkan kembali. Di daerah Kabupaten Karimun saja, jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan yakni paling banyak sekitar 20 orang itu pun pengunjungnya rata-rata dari pelajar. Sehingga, penyebab

kurangnya minat masyarakat Kabupaten Karimun dalam hal membaca disebabkan oleh budaya yang memang dari dulu masyarakat tidak minat untuk membaca.

(Sumber:Haluankepri.com: Akses, 19 Desember 2014).

2. Perpustakaan umum di Kabupaten Karimun masih terbatasnya sarana dan prasarana yang belum mencerminkan suatu fasilitas dari perpustakaan yang ideal sesuai dengan tuntutan pengguna.
3. Sumber daya manusia di Kabupaten Karimun, dilihat dari segi kualitas perpustakaan umum di Kabupaten Karimun terdapat mengenai riwayat pendidikan SD,SLTA dan SLTA.

Oleh karena itu, peneliti memberi judul penelitian **“Kebijakan Pengembangan Perpustakaan Umum di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2013”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang penyajiannya secara deskriptif (Suyato Bagong, 2010:5). Peneliti menggunakan konsep dan kerangka konseptual yang mana peneliti meninjau secara langsung objek penelitian, mencari data dan memecahkan masalah yang sedang berlangsung atau dihadapi saat ini. Berdasarkan faktor yang tampak untuk kemudian di analisis sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat menjawab dan mengatasi permasalahan yang ada. Lokasi penelitian adalah di Karimun dan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun yang terletak di daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Penelitian menggunakan sumber data, Berikut adalah sumber data dalam penelitian ini yang terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive*. (Nasution, 2006:98)
- b. Dokumen penelitian yang diambil mengenai upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah di Kabupaten Karimun.

Jenis Data mempunyai dua jenis, yaitu :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki M.M, 2002:55)
- b. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan, sumber

sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original. (Uber silalahi, 2010:291).

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah melalui Observasi atau pengamatan yang Merupakan teknik penelitian yang memusatkan perhatian terfokus pada kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. (Emzir, 2012:36)

Selanjutnya Wawancara (*Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dan berkompeten tentang permasalahan dalam penelitian guna memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan masalah penelitian. Dan Dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen resmi tertulis, gambar, foto, atau benda-benda yang berkaitan dengan aspek-aspek yang ingin diteliti (Widodo, 2012:61).

Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif dari kebijakan pengembangan perpustakaan umum di Kabupaten Karimun yang diperoleh dari observasi secara langsung pada objek penelitian dan wawancara dengan cara menghubungkan secara kualitatif. Selanjutnya apabila data-data yang diperlukan terkait dengan penelitian terkumpul, peneliti akan memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis data tersebut. Peneliti selanjutnya menganalisa deskriptif analitis dengan menggambarkan secara jelas berdasarkan kenyataan

lapangan sehingga diperoleh analisa seobjektif mungkin.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengembangan Perpustakaan Umum di Kabupaten Karimun

Saat ini Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun belum memiliki kebijakan pengembangan perpustakaan yang baku. Adapun kebijakan pengembangan perpustakaan yang dilaksanakan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun melalui kebijakan teknis operasional, yakni:

1. Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat di Kabupaten Karimun

Berkaitan dengan upaya Pihak Kantor Perpustakaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam meningkatkan budaya baca masyarakat, dalam hal ini perlu adanya kebijakan-kebijakan teknis operasional yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun, salah satu diantaranya :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam menyediakan buku.

Salah satu elemen penting untuk perpustakaan yaitu kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang sangat berperan dalam pengembangan minat baca masyarakat, terbukti bahwa sejauhmana komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun terhadap penyediaan buku untuk perpustakaan umum di Kabupaten Karimun. selain itu juga instansi-instansi yang berkaitan turut adil menyumbangkan sebagian buku untuk perpustakaan.

Maka itu, Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun perlu adanya Mekanisme koordinasi atau kerjasama antara berbagai instansi lain dan masyarakat, tidak terlepas dari adanya pendekatan kebijakan. Dengan adanya koordinasi ini maka akan ada suatu program atau kegiatan dapat berjalan lancar dan sesuai yang direncanakan.

Sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 2 tahun 2010 tentang pembudayaan kegemaran membaca pada pasal 41 ayat (1) menjelaskan bahwa: "Pemerintah Daerah dan Masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca." Selain itu juga pada pasal 42, menjelaskan bahwa: "Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam pasal 41 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses". Maka dari itu pula Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sudah beroptimal dalam menyediakan dan memberikan bahan bacaan untuk perpustakaan umum di Kabupaten Karimun. Tersedianya bahan bacaan yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat merupakan prinsip pengembangan minat membaca, dengan cara seperti inilah akan mendorong tumbuhnya minat membaca masyarakat dalam berkunjung ke perpustakaan.

Dimana dari fakta yang terjadi saat ini yaitu tingkat kesadaran dan minat masyarakat untuk mengunjungi dan memanfaatkan perpustakaan umum di Kabupaten Karimun mengalami

penurunan padahal Pemerintah Daerah telah memberikan dan menyediakan bahan bacaan bermutu untuk perpustakaan umum di Kabupaten Karimun, akan tetapi dari observasi peneliti terkait bukti-bukti dari pengunjungnya kian mengalami penurunan. Salah satu elemen penting dalam permasalahan yang terjadi saat ini di Perpustakaan umum tersebut adalah kurangnya minat membaca masyarakat dalam memanfaatkan perpustakaan yang ada.

2. Kebijakan pengembangan budaya baca melalui Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui secara langsung yaitu dengan survei dan mendatangi setiap sekolah-sekolah yang ada di kecamatan serta di daerah yang pelosok. Upaya Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna perpustakaan yaitu mengadakan pelayanan perpustakaan keliling. Adapun yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No.43 tahun 2007 tentang Perpustakaan pada pasal 30 ayat (1), berbunyi : ‘Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan untuk meningkatkan citra perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan serta meningkatkan budaya kegemaran membaca masyarakat.’

Sosialisasi secara langsung selain melalui pelayanan perpustakaan keliling ada juga dalam kegiatannya melakukan pembinaan pada

perpustakaan sekolah, sosialisasi secara langsung yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun yakni dengan kegiatan perlombaan. Perpustakaan keliling dan diadakannya sosialisasi berupa perlombaan sebagai kualitas penyelenggaraan perpustakaan.

Selain itu juga, kegiatan publikasi yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun untuk mengembangkan perpustakaan terhadap budaya baca. Kegiatan publikasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan perpustakaan umum di Kabupaten Karimun menghimbau masyarakat agar gemar membaca dan juga merupakan sarana informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun. Publikasi yang dilakukan kebanyakan melalui radio dan dalam bentuk spanduk, baliho untuk menghimbau masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Perpustakaan umum di Kabupaten Karimun.

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun terhadap Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perpustakaan.

Efektivitas suatu organisasi secara langsung tergantung pada efektivitas kerja sumber daya manusianya untuk mencapai efektivitas kerja sumber daya manusia yang unggul dapat selalu dikembangkan dengan upaya kualitas sumber daya manusia (HAW.Widjaja, 2004:79). Memang tidak dapat dipungkiri kualitas dari sumber daya manusia faktor utama keberhasilan sebuah perpustakaan, maka dari itu sumber daya manusia

prioritas utama di perpustakaan umum bagi pegawai harus diberi secara insentif melalui pembinaan. Dari kondisi ini, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab atas pengembangan sumber daya aparatur perpustakaan di Kabupaten Karimun dengan cara melakukan pembinaan terhadap pegawai ada di perpustakaan secara terpadu.

Ada beberapa langkah perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan pegawai perpustakaan umum di Kabupaten Karimun, langkah tersebut direncanakan dengan baik. Dalam perencanaannya, pembinaan sumber daya manusia dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu pengelola perpustakaan mana yang nantinya akan mendapat giliran untuk dibina. Dalam hal pembinaan terhadap bagian dalam perpustakaan, Pemerintah Daerah telah melakukan pembinaan dari segi peningkatan anggaran, sumber daya aparatur perpustakaan untuk menunjang kualitas dan kuantitas yang ada di perpustakaan umum Kabupaten Karimun.

2. Kebijakan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam mengembangkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perpustakaan.

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun dalam upaya peningkatan kualitas SDM telah mempunyai program yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur khususnya dibidang perpustakaan. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ini diselenggarakan dengan mengikutsertakan pegawai-pegawai dalam bentuk kegiatan diklat, seminar-seminar, dan bimbingan dari

bidang perpustakaan. Adapula implementasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di perpustakaan umum Kabupaten Karimun dimana terdapat dalam pergerakan sumber daya manusia yang tercermin dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Perpustakaan. Salah satu cara untuk menggerakkan SDM adalah dengan memberikan *reward and punishment*.

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Perpustakaan Umum di Kabupaten Karimun.

Perpustakaan umum di Kabupaten Karimun sebagai organisasi pelayanan publik dituntut untuk menyediakan pelayanan informasi yang aktual, tepat waktu, cepat, berkelanjutan dan mudah diakses sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengunjungnya maka diperlukan suatu komitmen disetiap kinerjanya sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah No.2 tahun 2010 pasal 12 tentang layanan perpustakaan terdapat pada ayat (1) dan (4) yang berbunyi : Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka dan pada ayat (4): layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.

Harbani Pasolong (2013:134) Mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi penting karena dapat memberikan manfaat bagi organisasi yang bersangkutan. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun memberikan kualitas pelayanan perpustakaan dengan sistem terbuka. Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun juga menyediakan sistem jenis layanan yang diberikan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari layanan sirkulasi, layanan koleksi referensi, layanan ruang baca yang nyaman, dan layanan informasi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Perpustakaan Umum Di Kabupaten Karimun

Kurang berjalannya peran perpustakaan umum yang ada di Kabupaten Karimun beserta pemerintah daerahnya dalam proses pengembangan dibidang perpustakaan umum Kabupaten Karimun ini akan berdampak pada pengaruhnya faktor-faktor yang berkaitan dengan 6 indikator yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan dan kinerja kebijakan yang menurut Van Meter dan Van Horn. Hal ini akan dijelaskan faktor-faktor dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan perpustakaan umum di Kabupaten Karimun, sebagai berikut :

1. Sasaran dan standar kebijakan

(Dwiyanto Indiahono 2009:38)

Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang.

Sasaran dan indikator sasaran kebijakan yang dituangkan berupa Renstra dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun tahun 2011-2016 yang ingin diwujudkan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pemerintah Kabupaten Karimun

secara keseluruhan merupakan kondisi yang diprediksikan untuk dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategis secara berkelanjutan. Dalam menentukan indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Karimun dengan beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun, yakni :

- a. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung Mobil perpustakaan keliling (MPK)
 - b. Meningkatkan jumlah-jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
 - c. Meningkatkan pelayanan pustakawan terhadap pengunjung perpustakaan
 - d. Menyimpan, memelihara, merawat dan mendayagunakan arsip sebagai warisan budaya bangsa khususnya budaya melayu dan sebagai bahan pertanggungjawaban nasional.
- (Sumber : Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun 2011-2016 : 27)**

2. Kinerja Kebijakan

Kinerja kebijakan adalah penilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal **(Rahardjo Adisasmita 2011:102)**. Maka Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun telah merencanakan untuk melaksanakan 7 program melalui pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan indikator kinerjanya beserta target kuantitatif yang menjadi komitmen Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun untuk mencapai kinerja yang paling maksimal.

1. Program pelayanan administrasi umum perkantoran
2. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. program peningkatan kapasitas SDM
4. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
5. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
6. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
7. Program perencanaan pembangunan daerah

3. Sumber Daya

(Dharma Setyawan Salam 2004:158) Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. **(Ika Meiria Dian Sarawati,2012:5)** Sumber daya yang utama didalam implementasi suatu kebijakan adalah implementor itu sendiri (Sumber Daya Manusia), kegagalan implementasi juga dapat disebabkan oleh Sumber Daya Manusia yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Oleh karenanya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan adanya SDM yang cukup didukung keahlian dan kemampuannya.

Diluar dari sumber daya manusia, sumber daya lain juga perlu diperhitungkan seperti sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia,

maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Begitu juga halnya yang terjadi di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun, sumber daya manusia masih belum bisa mememanajemenkan waktu merupakan salah satu hambatan dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Selain itu juga, keterbatasan sumber dana juga menjadi salah satu faktor penyebab kurang berjalannya suatu kebijakan.

4. Komunikasi antar badan pelaksana

Dalam hal ini komunikasi dan koordinasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Kantor perpustakaan mengadakan pertemuan untuk mengetahui perkembangan dari perpustakaan umum di Kabupaten Karimun, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap perpustakaan demikian juga Kantor Perpustakaan memberikan laporan kepada pemerintah daerah. Maka komunikasi antar badan pelaksana sudah di lakukan dengan baik dari Pemerintah Daerah dengan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam hal pengembangan perpustakaan untuk kedepannya. Adapun komunikasi dan koordinasi yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah dengan masing-masing SKPD agar semua bidang yang ada di Kabupaten Karimun ini lebih berupaya untuk menjaga kekompakkan antara Pemerintah Daerah dengan masing-masing SKPD.

5. Karakteristik badan pelaksana.

Karakteristik badan pelaksana dapat mempengaruhi suatu kebijakan. Dalam pengembangan

perpustakaan ini dipengaruhi oleh karakteristik badan pelaksana yang akan melaksanakan dan menyelenggarakan pengembangan di bidang perpustakaan umum di Kabupaten Karimun. Dalam hal ini kepemimpinan yang berubah-berubah dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pimpinan yang selanjutnya akan cukup sulit dalam melaksanakan program-program yang telah dibuat sebelumnya. Diperlukan adanya penjabaran program kepada Kepala Kantor yang baru.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Faktor lingkungan dari kinerja implementasi publik terdapat pada lingkungan ekonomi yaitu mengenai anggaran, hambatan terdapat pada proses perumusan kebijakan terutama kaitan dengan proses penentuan anggaran atau alokasi anggaran kepada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun dalam program pengembangan perpustakaan. Ini akibatnya bahwa lingkungan ekonomi, sosial dan politik akan merangkul semua dalam hal proses pelaksanaan kebijakan yang diselenggarakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pengembangan perpustakaan umum di Kabupaten Karimun.

Lingkungan sosial akan mempengaruhi minat seseorang untuk berkunjung ke perpustakaan. Minat berkunjung merupakan cerminan dari keinginan dan keinginan ini juga sebagai bentuk ketertarikan karena adanya rangsangan tertentu dari luar individu. Beberapa hal yang

mendorong masyarakat betah berada di perpustakaan diantaranya :

1. Rasa nyaman
2. Keadaan lingkungan fisik yang memadai
3. Keadaan lingkungan sosial yang kondusif
4. Layanan terakses secara online.

7. Sikap/Kecenderungan para pelaksana

Sikap para pelaksana dalam hal ini kurang berjalannya peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam melakukan pengembangan khusus dibidang perpustakaan umum yang dibentuknya ini akan dipengaruhi juga oleh faktor-faktor pelaksanaan program pengembangan perpustakaan umum di Kabupaten Karimun. Selama ini program-program yang telah dibuat oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun terdapat kendala dari sikap para pelaksana Pemerintah Daerah yang kurang adanya komitmen dalam menjalankannya. Pihak perpustakaan menganggap bahwa Pemerintah Daerah kurang memiliki komitmen untuk pengembangan perpustakaan sementara menurut Pemerintah Daerah sendiri mereka telah berupaya untuk menyelenggarakan kebijakan pengembangan perpustakaan dengan baik hanya saja pihak perpustakaan lemah dalam hal komitmen dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan karena masing-masing aktor dalam pelaksanaan kebijakan khususnya berkaitan dengan sikap para implementor akan sangat

berpengaruh terhadap kebijakan yang telah dibuat.

KESIMPULAN

Dari uraian analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka Penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dasar pengembangan perpustakaan umum di Kabupaten Karimun harus dilakukan berdasarkan kebijakan yang sesuai dengan pedoman pada standar perpustakaan umum yang dikeluarkan oleh perpustakaan nasional RI dan standar perpustakaan umum yang dikeluarkan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah melalui peraturan daerah provinsi kepulauan riau. Namun, Pemerintah daerah maupun KPAD sendiri saat ini belum memiliki kebijakan yang mengenai perpustakaan sehingga pemerintah Kabupaten Karimun saat ini belum memiliki kebijakan yang mengenai perpustakaan sehingga pemerintah Kabupaten Karimun belum memiliki pedoman tersendiri dalam menerapkan suatu kebijakan yang relevan dari perpustakaan umum. Adapun mengenai salah satu aspek dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun yang harus diatur secara hati-hati adalah permasalahan dari pengembangan perpustakaan umum di Kabupaten Karimun yaitu masalah kuarngnya minat membaca masyarakat dilihat dari jumlah pengunjung setiap bulannya, masalah dari
2. Selanjutnya faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan pengembangan perpustakaan ini dapat diidentifikasi dengan mempengaruhi kinerja kebijakan publik yang berupa: standar dan sasaran kebijakan, kinerja kebijakan, sumber daya manusia, karakteristik badan pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, sikap pelaksana, dan komunikasi antar organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu dalam pelaksanaan pengembangan perpustakaan umum di Kabupaten Karimun setiap instansi ini memiliki kekuasaan, kepentingan, strategi masing-masing dalam pengembangan perpustakaan. Hal ini berdampak pada standar dan sasaran kebijakan beserta kinerja kebijakan, karena pada dasarnya tugas pokok dan fungsinya masing-masing tidak ada peraturan daerah di Kabupaten Karimun yang khusus dalam pengembangan perpustakaan sehingga dalam pengembangannya tidak ada lembaga yang memiliki payung hukum yang kuat yang memiliki perhatian khusus dalam pengembangan

perpustakaan umum Kabupaten Karimun masih terbatasnya sarana dan prasarana yang belum mencerminkan suatu fasilitas dari perpustakaan yang ideal, dan masalah sumber daya manusia dari segi kualitas mengenai riwayat pendidikan dan kemampuan.

perpustakaan di Kabupaten Karimun.

Melihat permasalahan yang terdapat di Kabupaten Karimun dibidang pengembangan perpustakaan dan melihat kondisi perpustakaan yang masih kurang memadai serta melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan perpustakaan maka penulis menyatakan bahwa kurang efektifnya pemerintah daerah Kabupaten Karimun dalam pengembangan perpustakaan umum di Kabupaten Karimun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- _____,2007. *Perihal Ilmu Politik (Sebuah bahasan memahami ilmu politik)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adisasmita,Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Basuki. 1994. *Periodesasi Perpustakaan di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Bratakusumah, Deddy Supriady. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Bagong, Suyato. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada
- Hermawan, Rachman. 2006. *Etika Kepustakawanan*. Jakarta: Sagung Seto
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi)*. Bogor: PT.Ghalia Indonesia
- Isjoni,2009. *Menuju Masyarakat Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Ishak.2010. *Posisi Politik Masyarakat dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penaku
- Indiahono,Dwiyanto.2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: PT.Gava Media
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Gava Media
- M.M, Marzuki. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada
- Madani,Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- NS.Sutarno,2012. *Perpustakaan dan Masyarakat (Edisi Revisi)*. Jakarta: CV.Sagung Seto
- _____. 2006. *Manajemen Perpustakaan (Suatu pendekatan praktik)*. Jakarta: Sagung Seto
- Nasution. 2006. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy (Teori, Manajemen, Dinamika, Analisa, Konvergensi, dan Kimia*

- Kebijakan*). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, Agus Erwan. Sulistyastuti, Ratih Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Sutarno. 2003. *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Subarsono, M.Si, MA. 2011. *Analisa Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sutedjo. Mansur. 2012. *Layanan Cinta Perwujudan Layanan Prima 'Perpustakaan'*. Jakarta: Sagung Seto
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika aditama
- Suharno. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian proses dan analisis kebijakan*. Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI)
- Syafiie, Inu Kencana. 1998. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Pertja
- _____. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Salam, Setyawan Dharma. 2004. *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Yogyakarta: Anggota IKAPI
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Tjandra, Riawan W. Kurniawan, Agung. Estiningsih Muji. Hilal, Eko. 2005. *Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pelayanan publik*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- _____. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (center of academic publishing service)
- Wahab, Abdul Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wicaksono, Widya Kristian. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Skripsi

- Danies Widi Rahmanto. 2007. *Kebijakan Pengembangan Koleksi di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta*. Jurusan Ilmu Perpustakaan. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
- Jumaidi Husin Irkani. 2014. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Desa Tertinggal di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Tahun 2012*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- Maulana, Defri. 2012. *Implementasi Kebijakan Rintisan Sekolah*

Bertaraf Internasional Sebelum dan Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau

Jurnal

Fadillah Rahman. 2013. *Upaya Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Paser Dalam Meningkatkan Minat Membaca Masyarakat di Perpustakaan Umum Kabupaten Paser.* Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Ummul

Ika Meiria Dian Sarawati. 2012. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Implementasi Kebijakan Perpustakaan Desa di KPADD Kabupaten Kayong Utara.* Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Tanjungpura

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 Tentang *Perpustakaan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2014 Tentang *Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No.2 Tahun 2010 Tentang *Perpustakaan*

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No. 7 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan dan susunan organisasi lembaga teknis daerah Kabupaten Karimun*

Peraturan Bupati Kabupaten Karimun No. 17 Tahun 2008 Tentang *Penjabaran Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun*

Dokumen Tertulis

Renstra (*Rencana Strategis Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun*) Tahun 2011-2016

LAKIP (*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*) Tahun 2011-2013

Renja (*Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karimun*) Tahun 2011-2013

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun. *Karimun Dalam Angka 2011.* Katalog BPS 1102001.2101

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun. *Keadaan Geografis 2013.* Katalog BPS 112001.2101

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun. *Fisiografi Kabupaten Karimun 2013.* Katalog BPS 112001.2101

Website

<http://Kompasiana.com>. *Rendahnya minat baca siswa.* Diakses pada jumat, 04 Oktober 2015

<http://Haluankepri.com>, Karimun. *Minat Baca Masyarakat Rendah.* Diakses pada jumat, 19 Desember 2015